

NASKAH PUBLIKASI

**KERJA SAMA INTERNASIONAL SISTER CITY DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA DENGAN PERFEKTUR KYOTO**



Disusun oleh:

Azzomarayosra Wicaksono

20151060001

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUBUNGAN
INTERNASIONAL
PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMADIYAH YOGYAKARTA**

2017

**KERJA SAMA INTERNASIONAL SISTER CITY DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA DENGAN PEMERINTAH PERFEKTUR KYOTO**

Azzomarayosra Wicaksono
Program Magister Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Azzomaraa@gmail.com

Abstract

This research discusses about relationship sister city between DIY and Kyoto and how the development it. The reason for choosing this theme is because the concept and form of sister city relationship between DIY and Kyoto is very potential to increase cooperation in various sectors which can directly spur development in both cities. The method used qualitative and descriptive research method, that the research needed to see and find information as much as possible from a certain phenomenon. Thus, the research report will be a quote of the dat to illustrate the presentation of the report. The data comes from interview scripts, notes or memos ,journal and official documents. The result of this research is the relationship of sister city DIY with Kyoto. And the resulted in DIY collaboration with Kyoto to increasing cooperation also exchange information to build their region to better development prosperity.

Keyword : Sister city, DIY, Kyoto, Cooperation

Abstrak

Penulisan ini membahas mengenai hubungan sister city antara DIY dengan Kyoto serta bagaimana perkembangan di dalamnya. Alasan memilih tema ini yaitu karena konsep dan bentuk hubungan sister city antara DIY dengan Kyoto ini sangatlah potensial bagi peningkatan kerja sama di berbagai sektor yang secara tidak langsung dapat memacu perkembangan di kedua kota tersebut. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena tertentu. Dengan demikian, laporan penelitian akan berupa kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan atau memo, dan dokumen resmi. Hasil dari penelitian ini yaitu hubungan sister city DIY dengan Kyoto menghasilkan kolaborasi DIY dengan Kyoto dalam meningkatkan kerja sama juga tukar-menukar informasi untuk membangun daerah menuju kesejahteraan pembangunan yang lebih baik.

Katakunci : Sister city, DIY, Kyoto, kerja sama

PERNYATAAN PERSERUJUAN PUBLIKASI

Dengan ini kami selaku mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hubungan Internasional universitas Muhammadiyah Yogyakarta:

Nama : Azzomarayosra Wicaksono

NIM : 20151060001

Program Studi : S2 Magister Ilmu Hubungan Internasional

SETUJU jika naskah publikasi (jurnal ilmiah) yang disusun oleh yang bersangkutan setelah mendapat arahan dari pembimbing, dipublikasikan untuk kepentingan akademis.

Yogyakarta, 08 September 2017

Azzomarayosra Wicaksono

20151060001

A. Latar Belakang Masalah

Sister city dapat didefinisikan ketika sebuah komunitas dari berbagai ukuran memutuskan untuk join dengan masyarakat di negara lain untuk mempelajari lebih lanjut tentang satu sama lain, dan untuk mengembangkan pertukaran pembelajaran, selanjutnya dua aktor dari sister city mengusulkan afiliasi resmi yang mengarah ke perjanjian sebagai '*Sister City*'. Hubungan tersebut menjadi resmi dengan menandatangani perjanjian formal dengan dua yurisdiksi resmi.¹ Sister city memiliki kebutuhan intrinsik untuk melibatkan semua bagian dari masyarakat, terutama pemerintah daerah, relawan dan sektor swasta, untuk membentuk layak, kemitraan produktif. Lebih dari program internasional lainnya, hubungan sister city melibatkan keragaman seluas mungkin pertukaran dan proyek. Pada dasarnya, apa pun yang terjadi di dalam masyarakat telah menjadi subyek dari proyek sister city. Ini meliputi berbagai bidang seperti seperti ekonomi, pendidikan, pengembangan usaha, environment, seni, perawatan kesehatan dan banyak lagi.

Saat ini, dengan popularitas kemitraan sister city ini, dapat diprediksi bahwa ribuan kota di seluruh dunia bekerja sama satu sama lain, terutama negara-negara berkembang. Asumsi ini dapat dibuktikan pada South East Asia yang dikategorikan sebagai daerah berkembang, tetapi jumlah kota yang menerapkan program sister city meningkat secara semakin banyak di Indonesia hingga tahun 2014, ada 14 kota di Indonesia yang dibuat sehubungan dengan kota-kota asing, yaitu.; Banda Aceh, Medan, Jakarta, Bandung, Bogor, Bau - Bau, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, Manado, Kupang, Ambon dan Kabupaten Kepulauan Aru. Dari contoh-contoh ini, dapat diprediksi bahwa selanjutnya bisa lebih banyak kota lainnya melakukan hal yang sama, sehingga kota-kota di Indonesia yang cukup produktif membuat hubungan dengan kota-kota asing. Alasan inilah banyak kota menerapkan Program sister city . Salah satu kota yang menjadi perhatian utama tesis penulis adalah Yogyakarta (Indonesia) yang memiliki hubungan dengan Kyoto (Jepang).

¹ <http://nhsistercities.org/page/what-are-sister-cities> diakses 08 desember 2016

Sebelum menjelajahi lebih jauh, diketahui bahwa Indonesia dan Jepang memiliki hubungan yang baik, terutama pada sektor pembangunan. Hal ini karena lokasi geografis kedua negara dan keinginan yang sama untuk membangun perdamaian, stabilisasi dan kesejahteraan, juga perjuangan untuk kedua kota untuk meningkatkan kerja sama tentang masalah lingkungan (termasuk bencana alam), ancaman kejahatan dan kesehatan. Karena kerja sama yang ketat ini, mendorong DIY sebagai sub-negara bagian Indonesia untuk membuat hubungan dengan sub-negara di Jepang.

Visi kedua kota melakukan kerja sama adalah dengan semangat persahabatan untuk memajukan hubungan pariwisata dan hubungan ekonomi antara Indonesia dan Jepang. Keuntungan dari sister city antara DIY dengan Prefektur Kyoto menciptakan hubungan internasional adalah pertukaran informasi, gagasan, pengetahuan dan kebudayaan. Hal ini juga memperbesar wawasan masyarakat dan aparat pemerintahan DIY.

Sebenarnya, program sister city antara DIY dengan Prefektur Kyoto diperlukan untuk membandingkan banyak aspek. Kerja sama ini dapat digunakan untuk melihat kemajuan kota-kota lain dan diadopsi caranya. Kerja sama ini telah dilakukan dari tahun 1985 namun masih berjalan di sektor yang menjadi utama kerja sama prioritas ditandatangani seperti seni dan budaya, pariwisata, pendidikan, pembangunan, lingkungan, transportasi, industri, investasi, transportasi, dan pertanian.

Kyoto, adalah sebuah Prefektur di negara Jepang yang terletak hampir di tengah-tengah pulau Honshu. Perekonomian prefektur Kyoto sangat tergantung pada sektor pariwisata. Daerah utara Kyoto terdapat usaha perikanan yang maju, sedangkan di tengah-tengahnya terdapat usaha perkebunan dan perhutanan. Nintendo, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang hiburan juga berbasis di Kyoto.²

Gubernur Kyoto pada waktu itu, Yukio Hayashida yang telah banyak mengetahui kondisi DIY karena sewaktu perang dunia II ditugaskan di DIY, memiliki keinginan untuk menjalin kerja sama dengan Provinsi DIY. Keinginan tersebut disambut baik oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono IX karena adanya hubungan pribadi antara kedua belah pihak.

² Kyoto Prefecture pada www.pref.kyoto.jp/index_e.html diakses 07 september 2017

Hubungan kerja sama tersebut mulai resmi dilakukan sejak 16 Juli 1985 bersamaan dengan ditandatangani persetujuan hubungan kerja sama persahabatan antara kedua pemerintah provinsi oleh Sri Paku Alam VIII selaku wakil Gubernur DIY dan Yukio Hayashida selaku Gubernur prefektur Kyoto. Latar belakang utama kerja sama tersebut antara lain yaitu kedua provinsi adalah tujuan wisata baik internasional maupun domestik, lalu kedua ibukota provinsi tersebut pernah dijadikan ibukota negara dan memiliki nilai-nilai perjuangan, serta kedua provinsi memiliki keindahan alam yang dapat diandalkan bagi pengembangan pariwisata dan pendidikan. Adapun bidang-bidang yang disepakati Kesenian dan Kebudayaan, Pendidikan dan Tehnologi Ilmu Pengetahuan, Peningkatan Pariwisata, Industri, Lain-lain.

Dengan dibangunnya kerja sama persahabatan bertajuk Sister Province tersebut, maka diharapkan kedua belah pihak dapat saling membantu dalam berbagai sektor. Dan juga memberi perubahan dan manfaat baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sehingga tolak ukur kesuksesan dari kerja sama ini dapat terlihat perkembangannya.

Pada perjalanannya, kerja sama kedua belah pihak ini masih ditemukan kendala, antara lain belum optimalnya kinerja komite bersama yang telah terbentuk, masyarakat yang belum terlalu aktif dikarenakan masih banyaknya masyarakat yogyakarta yang belum mengetahui, merasakan, dan sadar hasil dari kerjasama sister city, pemanfaatan pengetahuan dan keterampilan petugas yang pernah mengikuti pelatihan di Kyoto tidak maksimal, pada bidang pendidikan kerja sama dirasa belum konkrit dan terasa lepas tangan dalam penanggung jawabannya, anggaran juga merupakan kendala yang paling penting dikarenakan tidak hanya dengan Prefektur Kyoto kerja sama ini dilakukan, kerja sama ini baru intens setelah mendekati perayaan 5 tahunan, kerja sama ini juga dianggap sebagai kerja sama *ceremony*, serta belum ada mekanisme pelaporan terhadap penyelenggaraan kerja sama, sehingga tidak bisa diketahui perkembangan kerja sama ini. Padahal berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan hubungan kedua provinsi ini. Oleh karenanya, menurut penulis posisi DIY karena lebih diuntungkan karena lebih banyak dibantu daripada membantu.

Pada selanjutnya penelitian ini akan menganalisis tentang penerapan seperti apa yang membuat kedua kota dapat menjaga kerja sama, dan kemudian penerapan hasil /

keuntungan dari kerjasama tersebut, apakah itu memberi manfaat secara tidak langsung. Dan masalah ini sangat penting, untuk diteliti lebih lanjut, kita tahu tidak hanya tujuan dari kedua kerja sama, tetapi juga efektivitas dalam tahun ke 30 hubungan. Kesimpulannya, hubungan DIY dengan Prefektur Kyoto di masa depan kualitas kerja sama kedua belah pihak dapat berjalan lebih baik dari yang sebelumnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan yang terdapat pada latar belakang, kami tertarik untuk meneliti tentang :

Bagaimana implementasi dan evaluasi (*cost and benefit*) kerja sama sister city antara Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Prefektur Kyoto?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang akan menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan evaluasi *cost and benefit* dalam kerja sama DIY dengan Prefektur Kyoto.

D. Tinjauan Pustaka Dan Kerangka Teoritik

Dalam buku yang ditulis oleh Takdir Ali Mukti dengan judul buku “*Paradiplomacy kerjasama luar negeri oleh Pemda di Indonesia*” buku ini membahas tentang hubungan transnasional yang mewarnai sistem interaksi masyarakat dunia pasca rezim Westphalia memiliki karakter yang lebih partisipatif bagi semua aktor internasional, baik pada tingkat negara maupun lokal, institusional maupun individual. Hubungan transnasional tidak serta merta menghapuskan sendi utama kedaulatan suatu negara, namun melahirkan sebuah tuntutan untuk pengaturan lebih lanjut tentang komitmen negara untuk melakukan *share* kedaulatan dalam batas-batas konstitusinya. Kekuatan buku ini terletak pada upayanya untuk membangun 3 pikiran utama pertama, membangun konstruksi hubungan dan kerja sama luar negeri secara umum sekaligus meletakkan posisi pemda selaku aktor hubungan transnasional dalam skema itu, kedua membangun konstruksi hukum dalam kerja sama luar negeri, dan ketiga membangun konstruksi tata kelola dan koordinasi antara pusat dan daerah dalam urusan kerja sama

luar negeri. Contoh kasusnya seperti kerja sama sister city Pemprov DIY dengan Prefektur Kyoto, pada kasus tersebut buku ini menjelaskan implementasi dari kerja sama tersebut dapat dilihat dari latar belakang hubungan kerja sama, kegiatan yang telah terlaksana hal-hal yang disepakati serta manfaat kerja sama yang telah dilakukan sehingga.

Selanjutnya penelitian dari Jawahir Thontowi UII berjudul 'Kewenangan daerah dalam melaksanakan hubungan luar negeri studi kasus pada Propinsi Jawa Barat dan DIY'. Dari hasilnya pelaksanaan kerja sama pemda dengan pihak luar negeri maka dapat ditarik kesimpulan yaitu Pemda bisa melaksanakan kerja sama internasional tidak bisa dilihat sebagai layaknya subjek hukum internasional yang lain seperti negara. Akan tetapi lebih kepada perpanjangan akan kekuasaan suatu negara bermula dari pemerintah pusat yang dijalankan oleh pemda. Pada hukum internasional pertanggung jawaban suatu perjanjian internasional tidak berada di daerah namun pada pemerintah pusat dalam mewakili suatu negara yang berdaulat. Kewenangan Pemerintah daerah untuk melaksanakan kerja sama luar negeri yang berdasarkan pada MoU yang mengatur pada UU No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Jadi MoU adalah salah satu bentuk perjanjian internasional yang mengaplikasikan keinginan kedua belah pihak atau lebih untuk menciptakan kewajiban hukum baru yang dapat mengikat dan mengatur hukum internasional, oleh karena itu untuk membantu tunduk dalam ketentuan hukum internasional. Pada hasilnya hal ini dilakukan oleh Pemda Jabar dan DIY dengan tiga model perjanjian internasional yang direncanakan yaitu:

1. Perjanjian kerja sama antara pemda Jabar dan DIY pada pemerintah daerah luar negeri yang berupa kerja sama sister city / province.
2. Kerja sama pemerintah daerah dengan swasta asing yang meliputi sosial, ekonomi, budaya, infrastruktur tenaga kerja dan teknologi, dan pariwisata.
3. Kerja sama pemda dengan lembaga swadaya masyarakat luar negeri dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan aparatur pemerintah.

Kerja sama Internasional yang dilaksanakan Pemerintah daerah tidak bertentangan dengan konstruksi Indonesia. Jadi, kapasitas daerah pada hal kerja sama tersebut yang sifatnya merupakan agen dari negara sebagai subjek hukum internasional. Ini dibuktikan dengan adanya full powers dari Departemen luar negeri yang dapat melakukan kerja sama internasional untuk meningkatkan kualitas dan kepentingan nasional negara.

Literatur yang ketiga adalah journal UGM oleh Agustinu Supriyanto dan Andi andi ATT yang berjudul 'Pengembangan potensi propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui kerja sama sister province'. Hasil dari penelitiannya menyimpulkan potensi apapun yang dimiliki daerah yang memenuhi unsur *sistership*, *similarities*, dan kesedrajan dengan daerah di luar negeri dapat dikerjasamakan dalam hubungan *sister province*, berjalan tidaknya kerja sama sister province menyangkut paling tidak empat hal yaitu *contact person* professional, posisi masing-masing pihak konsisten, kelembagaan, yang di bentuk dan diatur secara proposional, dan dana mencukupi akan mengakibatkan kerja sama ini berjalan lancar jika sebaliknya akan mengakibatkan kerja sama tersebut tidak dapat dijalankan, yang terakhir dalam rangka mengoptimalkan kerja sama sister province Deplu sudah bersikap lebih proaktif dalam mengimplementasikan UUPI sedangkan pihak provinsi khususnya DIY kurang proaktif untuk mengimplementasikan UUPI.

Literatur yang keempat adalah dari Khoera Dara Fazra (UMY, 2015). Hasil dari penelitiannya yaitu mengenai *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Kerja sama Internasional yang menyatakan bahwa Pemerintah Kota Bogor dan Kota Nanning dalam melakukan kerja sama banyak dilaksaaka dan diambil alih oleh pemerintah daerah, dan pemeritah pusat tidak banyak mengambil wewenang dalam kerja sama Sister City kedua kota.*

Literatur kelima yaitu Albert (Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2011). Hasil penelitian Albert menyatakan faktor-faktor yang menunjang keberhasilan dari Sister City Semarang - Brisbane, ada 6 faktor yaitu : (1) faktor kompetensi SDM, (2) faktor funding sebaiknya ditanggung oleh kedua belah pihak dan dikelola oleh lembaga keuangan terkait, (3) faktor insfrastruktur yang berperan adalah komunikasi

dan jalan raya, (4) faktor kelembagaan pemerintah, dimana pemerintah merupakan titik keberhasilan terbesar dalam Sister City (5) faktor masyarakat harus aktif dalam sister city, dari semua pihak dan juga aktor pemerintahan dan (6) faktor negara mitra.

Kelima literatur review diatas memberikan masukan dan pandangan kepada penulis sekaligus memberikan wawasan kepada penulis untuk mencoba menemukan hal-hal yang baru dari penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Seperti yang sudah di singgung sebelumnya bahwa penelitian ini terfokus pada penganalisisan implementasi dan evaluasi kerja sama sister city DIY dengan Prefektur Kyoto.

1. Konsep Sister City

Sister City ataupun kota kembar merupakan konsep dua kota yang berbeda lokasi dan administrasi politik dalam tujuan menjalin hubungan budaya dan kontak sosial antar penduduk, individu dan kelompok. Kota kembar pada umumnya memiliki kesamaan keadaan demografi dan masalah-masalah yang dihadapi.

Awalnya tujuan utama kerja sama antara kota dari negara yang berbeda dalam menjalankan hubungan antara masyarakat kota di suatu negara dengan masyarakat kota lain di suatu negara sebagai *people to people diplomacy*. Pada hal ini kerja sama ini juga akan dapat menjadi hal baru dalam mencari promosi dan pasar investasi di samping untuk membantu mengoptimalkan potensi yang ada. Kerja sama sister province atau kota kembar juga merupakan hubungan kerja sama antara kota di suatu negara dengan kota lain di suatu negara .

Di Eropa sendiri kerja sama ini disebut dengan *Friendship Towns, twin towns* dan di Jerman disebut *Partner Towns*, di Amerika Utara, Asia dan Australia disebut Sister City dan pada negara-negara bekas Soviet disebut *Brother cities*. Kerja sama internasional sister city ini ditujukan untuk membangun kerja sama menyeluruh pada tingkat kota dalam memajukan kebudayaan, serta mendorong perkembangan ekonomi.

Menurut Sidik Jatmika dalam buku Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional memberikan pengertian tentang hubungan kerja sama sister city, yakni hubungan kerja sama kota kembar yang dilaksanakan antar pemerintah kabupaten, kota dan administratif dengan Pemerintah Kota setingkat di luar negeri. Pada

hubungan kerja sama yang dimaksud haruslah dilengkapi dengan program serta kegiatan yang tetap dan terencana, baik mengenai bidang-bidang yang ingin dikerjasamakan, dengan tujuan yang ingin dicapai dengan kontribusi biaya masing-masing pihak serta lamanya waktu yang di perlukan bagi program dan kegiatan yang dikerjasamakan.³

Pada dasarnya, baik Pemerintah Daerah Tingkat I maupun Tingkat II dapat mengajukan hubungan kerjasama luar negeri yang bermanfaat guna menunjang program pembangunan dan membantu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sejauh tidak merugikan ketertiban dan keamanan umum, stabilitas politik dalam negeri, dan tetap terpeliharanya kepribadian nasional.

Lebih lanjut hubungan kerja sama sister city hanya merupakan kegiatan insidental yang berhubungan dengan surat-menyurat, tukar-menukar informasi, saling kunjung dalam misi kebudayaan / kesenian, mempromosikan pariwisata dan kunjungan persahabatan antara kedua belah pihak Pemerintah daerah / kota yang pada perkembangannya lebih mengarah kepada bidang-bidang ekonomi dan perdagangan.

Dari sekian banyaknya model kerja sama yang dapat dijalin oleh Pemerintah daerah . Sister city menjadi sebuah alternatif kerja sama yang sering kali dipakai untuk mengembangkan persahabatan antar kota-kota/ antar pemerintah daerah, menciptakan peluang bagi warga kota untuk mengambil pengalaman dan menjajaki kebudayaan lainnya melalui proyek jangka panjang yang ada, menciptakan suasana dimana hubungan ekonomi dan jalinan perdagangan dapat di kembangkan atau di implementasikan dan diperkuat, serta dapat mendorong lingkungan di mana mitra masyarakatnya dapat belajar lebih kreatif, bekerja, memecahkan persoalan bersama. Pembentukan sister city ini dapat mencakup berbagai bidang atau subjek kerjasama dalam satu hubungan kerjasama. Sehingga kota dapat meraih pembangunan berkala meskipun dengan satu partner kota saja.

Kerja sama sister city lebih menekankan kepada kesamaan kondisional kota, yang mana kesamaan-kesamaan tersebut menjadi faktor yang paling utama dalam

³ Sidik Jatmika, Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional.hal 108

mengadakan kerja sama kota kembar. Mengingat kerja sama yang mengarah kepada kota kembar maka segala aspek yang selaras menjadi pengikat bagi kedua belah pihak dalam mengembangkan kerjasama tersebut.

Adapun bidang-bidang yang boleh dijadikan subjek kerja sama antara daerah / kota pada kerjasamanya sebagai kerja sama sister city, dan bidang-bidang tersebut antara lain;

- a. Kerja sama ekonomi pada bidang investasi, perdagangan, ketenagakerjaan, kelautan dan perikanan, kehutanan, ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan hidup pertambangan dan kependudukan, pertanian, pariwisata dan perhubungan.
- b. Kerja sama social dan budaya dalam bidang kesehatan, kepemudaan, pendidikan, olahraga, kewanitaan, dan kesenian.
- c. Dan Bentuk-bentuk kerja sama lainnya.

Sebagai kota yang berlainan negara, tentu saja memiliki berbagai perbedaan dari segi ekonomi, adat bahkan secara geografisnya dapat dikatakan hampir tidak mungkin dipadukan. Namun pada kenyataannya, terdapat beberapa hal yang apabila diteliti lebih lanjut memiliki pokok-pokok persamaan yang hampir semua daerah memilikinya. Hal ini disesuaikan dengan pembeda dalam surat edaran mendagri No.193/1652/PUOD tertanggal 26 april 1993, tentang terbentuk hubungan kerja sama sister province dan sister city yang harus berdasarkan pada beberapa kriteria berikut pertama adanya kesamaan status dan kedudukan administratif kota, kesamaan fungsi dan besaran, kesamaan mengenal permasalahan, ilmu, karakteristik dan teknologi yang dapat dialihkan, dan kesanggupan kedua belah pihak yang bersangkutan dalam bidang ekonomi sehingga aliran barang antara kedua belah pihak lancar.

Dari keenam kriteria di atas yang menjadi faktor yang mempengaruhi kota Yogyakarta yang kemudian menjadi pendorong untuk terciptanya hubungan kerja sama sister city dengan Kyoto adalah adanya kesamaan dari segi kedudukan dan status sebagai kota, adanya kesamaan daerah yang mengacu pada kebudayaan asli daerah, dan kesamaan permasalahan kedua kota.

Beberapa pokok bidang yang bersama-sama di sepakati dan akan dilaksanakan bersama untuk mengisi kerja sama sister city ini adalah terdiri dari beberapa bidang seperti⁴ ;

1. Bidang kebudayaan. Meningkatnya kemampuan pengelolaan konservasi cagar budaya di provinsi DIY, melalui pengiriman petugas untuk belajar konservasi, melalui kegiatan lomba dan pameran pertukaran lukisan anak DIY Kyoto dan Jogja-Japan week yang diselenggarakan tiap tahun.
2. Bidang pendidikan. Pembentukan *Kyoto Book Center* yang sebagian besar buku dalam bahasa Jepang yang merupakan hibah dari Kyoto, pertukaran mahasiswa dengan pemberian beasiswa melalui program pemberian beasiswa pemerintah Kyoto salah satunya Ritsumeikan University.
3. Bidang pariwisata. Melalui penerimaan dua orang ekspert pada tahun 2003 yang memberikan pelatihan bagi praktis pariwisata serta meningkatnya turis asing dari Jepang khususnya dari Kyoto.
4. Dan bidang investasi. Mampu menjembatani hubungan antar pelaku bisnis di kedua belah pihak, terbukti dengan investasi yang diperoleh masyarakat kulon progo terkait dengan pembudidayaan tanaman indigo.

Selanjutnya kerja sama ini juga akan dijadikan motivasi untuk mencari promosi dan pasar investasi dalam mengoptimalkan potensi yang sudah ada. Kerja sama sister city disini berarti hubungan keaja sama antar kota di suatu negara dengan kota lain di suatu negara. Konsep Sister City inilah yang digunakan Yogyakarta untuk membuka kerja sama dengan kota-kota dari negara lain khususnya Kyoto guna terciptanya peluang dan keuntungan yang didapat dari kerja sama Sister City.

2. Teori atau konsep kerja sama internasional

Di dalam penelitiannya penulis ingin menggunakan teori kerja sama internasional ini, dikarenakan dalam tatanan hubungan internasional seperti saat ini, tidak adanya satu negara yang dapat berdiri sendiri dalam memenuhi kebutuhannya atau kepentingannya tanpa menjalin kerja sama dengan pihak lain. Kerja sama perlu

⁴ Bunga Rampai Kerjasama Luar Negeri Provinsi DIY, Biro Kerjasama, Setda Prov.DIY, 2006

dilakukan sebab adanya saling ketergantungan antar negara akibat dari semakin kompleks dan dinamisnya kebutuhan masyarakat yang tidak melulu dapat dipenuhi di dalam negaranya sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Koesnadi Kartasasmita bahwa kerja sama internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksitas kehidupan manusia dalam masyarakat internasional.⁵

Mengenai kerjasama internasional, terdapat beberapa definisi yang diberikan oleh K.J. Holsti, salah satunya adalah pandangan bahwa dua ataupun lebih nilai, tujuan, kepentingan saling bertemu dan akan menghasilkan sesuatu sehingga dapat dipenuhi atau dipromosikan oleh semua pihak sekaligus.⁶ Dengan kata lain kerja sama internasional diartikan sebagai suatu perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih (negara atau aktor internasional lainnya) dengan tujuan untuk mencapai kemajuan bersama serta meraih kepentingan yang hendak dicapai.

Di dalam hubungan internasional yang bersifat transnasional seperti saat ini, aktor sub state/pemerintah regional (pemerintah daerah) juga turut serta untuk melakukan kerja sama internasional. Tuntutan zaman mendesak daerah untuk dapat lebih aktif melaksanakan berbagai kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional, dimana diharapkan dari kerja sama tersebut dapat membantu daerah untuk memenuhi berbagai kebutuhan atau kepentingannya.

Adapun tujuan dilakukannya kerja sama internasional adalah demi mencapai kemajuan bersama dimana seluruh manfaat dari kerja sama tersebut akan dapat dirasakan oleh semua kalangan anggota masyarakat. Salah satu manfaat diantara kerja sama internasional ini yaitu: a. *Promoting tolerance and increasing understanding* dan b. *Promoting stronger community partnership*.

Dalam pembahasan kali ini mengenai kepentingan DIY ini, bahwa pada kerja sama sister city yang dilaksanakan oleh Provinsi DIY dengan Prefektur Kyoto adalah

⁵ Kartasasmita, koesnadi, 'Administrasi Internasional' 1977, hlm. 19, dalam Zulkifli. 2007. *Kerjasama Internasional Sebagai Solusi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara (Studi Kasus Indonesia)*. Tesis diterbitkan. Jakarta: Universitas Indoneisa, diakses dari [lib.ui.ac.id/file?file=digital/20305674...%20Kerjasama%20inter nasiona.pdf](http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20305674...%20Kerjasama%20inter%20nasiona.pdf).

⁶ Holsti K.J, 'Politik Internasional', Terjemaham Azhari, M.Tahrir, Erlangga, jakart, hlm. 652-653, 1988.

pada *'promoting stronger community partnership'* dimana memiliki pengertian bahwa adanya manfaat kerja sama secara umum akan meningkatkan hubungan bilateral kedua belah pihak antar DIY dengan Prefektur Kyoto. Kerja sama sister city antar DIY prefektur Kyoto bukan merupakan sebuah kerja sama yang berlaku bagi pihak pemerintahan saja, tetapi juga berlaku bagi semua warga masyarakat di kedua belah pihak kerja sama. Dijalannya kerja sama ini juga maka diharapkan dapat meningkatkan mutual understanding atau sikap toleransi antar DIY dan Prefektur Kyoto. Sehingga dimasa mendatang dapat terbina kemitraan yang baik antara DIY dengan Kyoto yang semakin kuat. Dengan melihat bahwa kerja sama ini kemungkinan akan berlangsung tanpa ada batas waktu. Saat terjadi Gempa Bumi di provinsi DIY tahun 2006 silam, negara yang paling cepat dalam hal memberikan bantuan adalah Jepang, khususnya dari pemerintah prefektur Kyoto itu sendiri.

Teori kerja sama internasional pada hal ini merupakan upaya yang digunakan dalam mengungkap sejauh mana kerja sama ini dapat meningkatkan hubungan bilateral antar DIY dengan Prefektur Kyoto. Sesuai dengan teori kerja sama internasional, ada dua kepentingan atau lebih yaitu adanya saling temu dan mampu menghasilkan sesuatu, ataupun dipenuhi dan dipromosikan oleh semua pihak sekaligus. Dalam hal ini antara DIY dengan Prefektur Kyoto sama-sama memiliki kepentingan tertentu yang kemudian kepentingan tersebut dipertemukan atau dibahas dan menghasilkan sebuah kesepakatan kerja sama internasional dalam bentuk sister city diantara keduanya. Dalam hal ini kepentingan DIY adalah demi meningkatkannya kualitas SDM di wilayahnya serta mengembangkan perekonomian daerah, sedangkan kepentingan Kyoto tidak dibahas atau dipaparkan mengingat rumusan masalah yang hanya memusatkan pada pembahasan mengenai kepentingan yang dimiliki oleh DIY.

E. Hipotesis

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi dari program sister city antara DIY dengan Prefektur Kyoto dilaksanakan dengan berupa bantuan teknis yang berwujud pengembangan dan promosi pariwisata, pertukaran pelajar,

jembatan pelaku bisnis dan bantuan hibah yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat DIY.

Evaluasi dari program sister city antara DIY dengan Prefektur Kyoto dilihat dari besarnya anggaran kerja sama ini dapat memberi keuntungan bagi Provinsi DIY dikarenakan manfaat dan hasil program yang telah terlaksana sampai saat ini.

F. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode eksplanatif. Bertujuan untuk menerangkan dan menguji hipotesis dari variabel-variabel penelitian dan untuk menjelaskan cost and benefit dari kerja sama DIY dengan Prefektur Kyoto.

G. Hasil dan Pembahasan

Otonomi daerah memberikan peluang yang sangat besar kepada daerah untuk melaksanakan pembangunan di berbagai sektor dengan prinsip desentralisasi berbagai kewenangan. Daerah dapat melaksanakan berbagai keputusan yang sangat penting yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerahnya. Keberhasilan otonomi daerah tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan pembangunan di berbagai sektor. Agar daerah mampu melaksanakan otonominya, maka daerah dituntut untuk memiliki budaya dan sikap *entrepreneurship* dalam mengelola sumber daya serta melaksanakan pembangunan daerah.

Pada hakikatnya kerja sama *sister city* ini merupakan salah satu dari produk teori paradiplomasi. Dimana pemerintah daerah melaksanakan fungsi desentralisasi kekuasaan politik dan kewenangan administratif. Jika dilihat secara teori, paradiplomasi dalam hal pelaksanaan kerja sama *sister city* antara DIY dengan Kyoto ini dapat digolongkan sebagai *global paradiplomacy* (paradiplomasi global). Sesuai dengan pengertiannya yaitu pemerintah sub nasional yang melakukan hubungan diplomasi berada dalam negara yang berbeda, dari kawasan yang berbeda, dari berbagai belahan dunia. Meskipun kerjasama *sister city* ini tidak terlibat isu-isu global dan isu-isu politik tingkat tinggi seperti pandangan *soltados*, namun kerjasama ini

melibatkan beberapa bidang kerjasama seperti perkonomian, pendidikan, parawisata, teknologi dan informasi.

Kerja sama *sister city* membuktikan bahwa militer bukan lagi menjadi solusi tunggal dan dominan untuk mencapai tujuan atau kepentingan Negara. Masih ada cara lain yaitu dengan mengembangkan kerja sama salah satunya adalah dengan kerja sama *sister city* yang dalam hal ini adalah kerja sama *sister city* DIY dengan Kyoto, seperti yang dikatakan oleh Keohane dan Nye dalam teori interdependensi kompleks bahwa mengembangkan kerjasama lebih efektif dalam mencapai tujuan-tujuan dan kepentingan Negara tersebut.

Selain itu, teori interdependensi kompleks mendukung bahwa kedua kota yang bekerjasama tidak bergantung satu sama lain. Karena kerja sama *sister city* ini terbentuk oleh adanya persamaan karakteristik kedua kota yang bersangkutan. Dengan adanya kerja sama *sister city* ini adalah untuk mengembangkan potensi dan keunggulan masing-masing kota, bukan untuk melengkapi kekurangan salah satu kota.

Untuk melihat keuntungan dan manfaat yang didapat DIY dalam kerja sama *sister city* ini bisa direalisasikan melalui perbandingan besarnya dana yang dikeluarkan dengan banyaknya manfaat secara langsung maupun tidak langsung yang diperoleh DIY dari 2015 sampai 2016. Pada tahun 2011 anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah DIY melalui Program pengembangan kerja sama pengelolaan kekayaan budaya dalam penyelenggaraan festival seni budaya kerja sama DIY – Kyoto yaitu:⁷ Rp. 520.000.000 dengan sisa anggaran dari sisa tiket perjalanan dinas ke Prefektur Kyoto sebesar Rp. 262.279.250 Adapun manfaat dan keuntungan yang dirasakan dari terjalannya kerja sama antara Provinsi DIY dengan Prefektur Kyoto, antara lain:⁸

No	Bidang	Manfaat langsung	Manfaat Tidak Langsung
1	Kebudayaan	Melalui penerimaan expert dari Jepang, diperoleh rekomendasi gambaran ideal dalam rangka penanganan pelestarian lingkungan cagar budaya di kawasan Tamansari,	Anggaran tahunan yang dikeluarkan DIY terkait kerja sama Dinas Kebudayaan dengan Prefektur Kyoto sebesar Rp. 80.000.000 juta /

⁷ Laporan Keterangan Pertanggungjawaban DIY Tahun 2011 pada program/kegiatan urusan kebudayaan

⁸ Takdir Ali Mukti, Paradiplomacy kerja sama Luar Negeri oleh Pemda di Indonesia, loc.cit.

		Kota Gede, Situs Gamping, dan Candi Boko. Juga terselenggaranya Jogja-Japan Week yang rutin diselenggarakan setiap tahun.	per 400 orang anak-anak dan remaja dalam acara tahunan yang diselenggarakan dinas kebudayaan dalam lomba lukis dan pameran anak DIY-Kyoto. Bagi anak-anak sekolah mulai dari taman kanak-kanak hingga SLTA di DIY dapat mengetahui tren/gaya melukis pelajar Jepang khususnya Kyoto serta memperoleh inspirasi dalam melukis. Dan dapat juga dilihat dari tujuan pengunjung kegiatan pameran lukisan DIY - Kyoto ini yaitu 42% memiliki tujuan untuk melihat karya pelajar antara kedua belah pihak, 38% mempelajari pola lukisan dan 20% peserta pameran yang ingin membandingkan karyanya.
2	Pendidikan	Pembentukan Kyoto Book Corner yang sebagian besar buku dalam bahasa Jepang merupakan hibah dari Prefektur Kyoto demi peningkatan wawasan budaya dan pengetahuan bagi para mahasiswa melalui kegiatan pertukaran mahasiswa serta peningkatan semangat belajar mahasiswa penerima beasiswa pendidikan di Jurusan Sastra Jepang, Universitas Gajah Mada (UGM), antara beberapa universitas swasta di DIY dengan Universitas Ritsumeikan di Jepang.	Adanya beasiswa dari Jepang yang bisa diakses pelajar Indonesia. Terjadi peningkatan jumlah mahasiswa Indonesia pada 2015 sebanyak 3,600 orang meningkat pada tahun 2016 sebanyak 4,630 orang. Terdapat kurang lebih 20-an beasiswa yang bisa diakses. Dana yang diberikan mulai dari 80.000 yen sampai 150.000 yen.
3	Pariwisata	Melalui penerimaan dua orang expert yang memberikan pelatihan bagi praktisi pariwisata, diperoleh peningkatan pengetahuan di bidang marketing bagi pelaku bisnis pariwisata di DIY.	Meningkatnya jumlah turis asing dari Jepang ke DIY tercatat sepuluh besar wisatawan mancanegara yang menggunakan jasa akomodasi di hotel bintang sebanyak 22.637 dan non bintang sebanyak 2.911 di DIY. Pada tahun 2016 Jepang menjadi peringkat ke-3 dalam sepuluh besar wisatawan asing yang datang ke DIY dengan jumlah wisatawan 25.548 orang.
4	Industri	Meningkatnya pengetahuan dan	Meningkatkan hubungan kerja

		keahlian petugas dalam hal keterampilan teknis melalui kegiatan training di bidang otomotif, kelistrikan, pemipaan, pengeplatan, pengelasan, serta diperolehnya kesempatan untuk promosi industri kerajinan melalui beberapa kegiatan pameran yang diikuti oleh beberapa perusahaan industri kerajinan.	sama di bidang Industri dan perdagangan antara DIY dan Kyoto(Jepang), Semakin luasnya pasar untuk produk DIY, Meningkatnya nilai ekspor DIY ke Jepang sebesar US\$ 17.984.406 pada 2015 naik menjadi US\$ 18.629.535 pada 2016.
5	Investasi	Mampu menjembatani hubungan antar pelaku bisnis di kedua belah pihak, terinformasikannya peluang bagi pelaku bisnis di Kyoto maupun di Provinsi DIY pada setiap penyelenggaraan pertemuan tahunan.	investasi Jepang pada tahun 2014 sebesar 2,7 Milyar, pada tahun 2015 sebesar 2,9 Milyar dan pada tahun 2016 naik menjadi 5,4 Milyar. Dan juga ada bantuan Sabo Dam dari JICA untuk beberapa titik sekitar Gunung Merapi sebanyak 250, pada 2010 erupsi merapi menghancurkan sebagian Sabo Dam sehingga JICA kembali memberi bantuan kembali untuk memperbaiki sisa 19 sabo dam sebesar kurang lebih Rp.500 milyar.

Berdasarkan data dan pembahasan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa kerja sama *sister city* ini memang menguntungkan bagi pihak DIY tetapi tidak menutup kemungkinan mengalami beberapa hal yang harus dibenahi agar memuluskan kerja sama kedepannya. Hal yang harus dibenahi dalam program kerja sama *sister city* yang terjadi antara kedua kota ini terjadi disebabkan beberapa kendala yang mungkin datang dari dalam atau luar kerja sama *sister city* ini. Kendala itu sendiri bisa terjadi dari dalam atau luar seperti yang dikatakan oleh sumber pada saat wawancara, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Eksternal

Menurut salah satu sumber yang diwawancarai, faktor terjadinya pasang surut kerja sama *sister city* Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Prefektur Kyoto ini adalah adanya paradigma nasional yang memandang bahwa kerja sama *sister city* ini hanya sekedar seremonial. Pengertian paradigma menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia (KBBI) mempunyai pengertian, yaitu menurut Patton (1975) paradigma adalah sebuah pandangan dunia, sebuah sudut pandang umum, atau cara untuk menguraikan kompleksitas dunia nyata.

Paradigma atau pandangan nasional yang menyatakan bahwa kerja sama *sister city* ini adalah sekedar seremonial menyebabkan pelaksanaan program kerja sama hanya alakadarnya saja dan tidak berjalan maksimal.

Pada factor eksternal dalam rangka kerja sama antara Pemerintah Provinsi DIY dan Kyoto adalah konsistensi dari pemerintah provinsi sahabat dalam membina hubungan , umumnya masalah tersebut berupa tidak adanya *contact person* / lembaga yang spesifik yang menindak lanjuti kerja sama yang telah disepakati.

Dalam upaya peningkatan hubungan bisnis antara kedua belah pihak , kendala yang terjadi yaitu kurang di kenalnya produk Yogyakarta khususnya dan umumnya produk Indonesia di luar negeri khususnya di Jepang yang mengakibatkan kendala pada saat bernegosiasi dengan pelaku bisnis Kyoto.

Bagi kalangan bisnis Kyoto, memberikan komitmen bernegosiasi pada perusahaan manca negara merupakan langkah besar yang dilakukan dengan kehati-hatian ini, terkenalnya suatu Brand di tingkat internasional merupakan salah satu hal yang sangat dipertimbangkan.

Kendala lain juga terlihat untuk waktu yang diperlukan oleh perusahaan Kyoto dalam memutuskan sesuatu sebagai jawaban terhadap kontak-kontak bisnis awal cukup memakan waktu yang lama. Sementara itu pelaku bisnis Kyoto juga kurang menyukai membahas masalah yang penting melalui telepon atau korespondensi, mereka lebih suka apabila pembahasan masalah dilakukan dengan komunikasi langsung atau tatap muka. Jadi inilah factor eksternal juga sangat mempengaruhi dan membantu keuntungan dalam kerja sama

2. Faktor Internal

a. Birokrasi

Birokrasi menjadi salah satu hal yang harus dibenahi demi terwujudnya suatu program kerja sama. Menurut Fritz Morstein Marx birokrasi adalah tipe organisasi yang digunakan pemerintah modern untuk menjalankan tugas-tugasnya yang bersifat

spesialis, dilaksanakan pada sistem administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintah.⁹

Pada pelaksanaan kerja sama *sister province* DIY sebagai salah satu aparatur pemerintah wajib menjalankan peraturan yang ada. Dalam menjalankan program kerja sama, pemerintah daerah DIY wajib mematuhi sistem administrasi yang ada dari mulai ke pemerintahan provinsi, lalu dari provinsi ke Kementrian Dalam Negeri, lalu ke Setneg. Proses yang seperti itu membutuhkan waktu kurang lebih selama satu bulan. Lamanya waktu yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan kerja sama ini sangatlah tidak efektif dan efisien pada birokrasi yang ada saat ini.

b. Anggaran

Pendanaan merupakan hal yang paling penting dalam pelaksanaan kerja sama *sister city* ini. Tanpa adanya anggaran, kerja sama *sister city* ini tidak akan berjalan. Anggaran itu sendiri menurut Y. Supriyanto, menunjukkan suatu proses sejak dari tahap persiapan yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan berbagai data dan informasi yang diperlukan. Pembagian tugas perencanaan, penyusunan rencana itu sendiri, implementasi dari rencana tersebut, sampai pada akhirnya tahap pengawasan dan evaluasi dari hasil-hasil pelaksanaan rencana.

Anggaran pelaksanaan kerja sama *sister city* ini berasal dari alokasi dana APBD DIY. Dimana menurut UU No. 32 Tahun 2003 tentang APBD, APBD merupakan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dalam peraturan Daerah (perda).¹⁰

Sulitnya menyelaraskan penyusunan program kemitraan dengan proses anggaran seringkali membawa kendala sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa semua rancangan anggaran yang diperlukan untuk kegiatan tahun berikutnya sudah harus disusun jauh sebelumnya. Sedangkan semua kegiatan yang tercakup dalam satu tahun anggaran adalah kegiatan yang terencana bukan yang bersifat dadakan.

⁹ Pandji Santosa, 2008. *Administrasi Publik : Teori dan Aplikasi Good Governance*. Penerbit PT Refika Aditama : Bandung.

¹⁰ Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Alokasi dana APBD DIY untuk kerja sama *sister city* dengan Prefektur Kyoto ini sangatlah terbatas, karena dana untuk pelaksanaan program kerja sama *sister city* ini bukan hanya dengan Prefektur Kyoto tetapi banyak kota lain yang juga melaksanakan kerjasama *sister city* dengan DIY seakan dana yang di keluarkan terasa tumpang tindih satu dengan yang lain. Sehingga pelaksanaan program tidak berjalan dengan maksimal sesuai dengan apa yang direncanakan, karena pelaksanaan program disesuaikan dengan mengefektifkan dan mengefesienkan dana yang ada.

c. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam kemajuan suatu negara. Jika sumber daya manusia nya kurang, maka negara tersebut mengalami kesulitan untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Akan tetapi dalam hal ini, penulis lebih menitik beratkan pada pimpinan sebagai suatu sumber daya manusia yang menggerakkan sumber daya manusia lainnya. Dalam ruang lingkup bahasan ini yang dimaksud adalah kepala BKPM. Kedudukan kepala BKPM sebagai pembuat kebijakan kerja sama DIY sangatlah menentukan eksistensi kerja sama *sister city* DIY dengan Kyoto.

Dari hasil wawancara yang didapatkan, kebijakan Gubernur tergantung pimpinan BKPM, dikarenakan sering terjadinya pergantian kepala pimpinan sehingga menyebabkan adanya sedikit ketidakpedulian dengan adanya kerja sama *sister city* ini dan mendukung paradigma nasional yang menyatakan bahwa kerja sama ini sekedar seremonial belaka. Oleh karena itu, kerja sama *sister city* sedikit terlihat eksistensinya, bahkan kebanyakan masyarakat tidak mengetahui tentang kerja sama *sister city* ini.

Krisis global juga membuat masing-masing kota yang terkena imbasnya sibuk untuk melakukan bangkit dan mulai membangun kembali daerahnya melalui berbagai cara yang telah ditetapkan. Sedangkan paradigma nasional ini membuat kerja sama *sister city* ini ada hanya untuk sebagai simbol bahwa pemerintah daerah telah melakukan kerja sama, bukan untuk sebagai jalan melakukan pembangunan daerahnya sendiri, sehingga kerja sama *sister city* ini kurang terlihat eksistensinya

Adapula karena masih terbatasnya sumber daya aparat perencana dan pelaksana pada bagian yang menangani kerja sama luar negeri dilingkungan pemerintah DIY adalah salah satu diantaranya yang terpenting. Sebagai bagian yang mengurus

kegiatan yang terkait langsung dengan urusan hubungan luar negeri, bagian kerja sama seyogyanya harus meningkatkan kemampuannya sehingga cakap menangani urusan seperti pola hubungan daerah luar negeri dengan dunia usaha, prinsip kebijakan bantuan luar negeri sejumlah negara sahabat.

Selain itu para pekerja bagian luar negeri diharapkan menguasai minimal satu bahasa asing supaya memudahkan bagian kerja sama menyerap informasi, berkomunikasi dan menyampaikan gagasannya di bidang kerja sama dengan para pihak yang berkepentingan di luar negeri.

Pada awalnya kendala bahasa biasanya dipecahkan melalui perekrutan tenaga penerjemah eksternal, namun menurut bagian BKPM mahal biaya jasa tersebut membuat keuangan semakin membengkak dan hal itu juga berdampak pada ketergantungan bagian kerja sama pada pihak jasa dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya.

d. Hal-hal lain

Adanya Fasilitasi persetujuan kerja sama antara Universitas Islam Indonesia (UII) dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dengan Universitas Ritsumeikan, Kyoto, Jepang, pada tahun 2011 lalu merupakan salah satu kendala kerja sama pada bidang pendidikan. Menurut hasil wawancara penandatanganan kerja sama ini sepenuhnya di lepaskan tanggung jawabnya kepada pihak yang bersangkutan yakni UMY dan UII dalam melakukan kegiatan selanjutnya.

Hampir sama dengan pelaku bisnis Kyoto Universitas Ritsumeikan sepertinya merasakan kurangnya popularitas dua universitas Yogyakarta ini sehingga kerja sama hanya sebatas penandatanganan tidak adanya tindak lanjut seperti pemberian beasiswa. Student mobility program yang ditawarkan juga dengan biaya penuh tanpa adanya bantuan dana. Oleh karena itu dari 2011-2016 tidak adanya mahasiswa yang dikirim dari Yogyakarta (UMY dan UII) ke Universitas Ritsumeikan maupun dari Kyoto (Universitas Ritsumeikan) ke UMY dan UII. Dan pada akhirnya kerja sama ini pun berhenti ataupun kadaluarsa pada tahun 2016 karena tidak ditindaklanjutinya lagi kerja sama ini.

H. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan. Dengan factor-faktor yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya secara teoritis hubungan kerja sama dengan daerah lain pada umumnya dan luar negeri pada khususnya (antara DIY dengan Kyoto) dinilai bermanfaat apabila hubungan tersebut mampu menumbuhkan persahabatan dan terjalin saling pengertian antara masyarakat ataupun daerah yang bekerjasama. Dengan alasan manfaat hubungan kerja sama diatas, maka memang sulit untuk menilai secara konkrit manfaat hubungan kerja sama dan sangat tergantung dari sudut pandang seseorang. Karena dilihat dari kerja sama sister city antara DIY dengan Kyoto ini tidak terlepas dari program pertukaran dan saling kunjung dikalangan pemda setempat secara berkala dianggap tidak bermanfaat dan perlu adanya evaluasi terkait hal ini. Sinisme terhadap sister city DIY dengan Kyoto ini sering dianggap hubungan kerja sama yang akan mendorong pemborosan karena kegiatannya hanya berkisar pada kegiatan jamu menjamu kenegaraan. Namun kegiatan itu tidak dapat dihindari dalam penyelenggaraan kerja sama, konsekuensinya adalah keuntungan yang terukur haruslah didapatkan untuk menghindari kesan borosnya anggaran yang digunakan.

Keuntungan disini dapat dinilai nilai ekonomisnya secara langsung maupun secara tidak langsung seperti fasilitas dan kemudahan yang disediakan oleh kerja sama sister city DIY dengan Kyoto terhadap kegiatan dunia usaha dan pembangunan daerah. Faktor yang menjadi kendala adalah faktor internal dan eksternal atau yang berasal dari tubuh kerja sama itu sendiri adalah adanya birokrasi yang kurang efisien, anggaran yang tidak cukup dan kebijakan pemimpin yang dalam hal ini pergantian kepala pimpinan badan yang mengurus kerjasama sister city ini. Birokrasi yang kurang efisien disini yang dimaksud adalah waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan persetujuan sangatlah lama, harus melewati berbagai departemen dari departemen terkecil yang bersangkutan sampai dengan departemen tertinggi yang menaungi atau sebagai pelindung dari kerjasama ini. Sedangkan mengenai anggaran, kerjasam *sister city* ini telah mempunyai anggaran tersendiri dari dana APBD, sehingga sebanyak dan sebagus apapun program yang direncanakan, maka suatu

program itu haruslah menyesuaikan dengan anggaran yang telah dianggarkan. Hal-hal diatas sudah seharusnya jadi motivasi dalam melakukan evaluasi agar kedepannya kerja sama ini dapat lebih maksimal hasilnya.

Daftar Pustaka

Bunga Rampai Kerjasama sama Luar Negeri Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
Biro Kerjasama, SETDA, Provinsi DIY, Tahun 2006.

Holsti, K.J, 'Politik Internasiional Kerangka Untuk Analiisis', Terjemaham Tahrir
Azhari, M. Tahrir Jakarta, Erlangga, Tahun 1988.

Jatmika, Sidik, 'Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional', Publishing
BIGRAF, Yogyakarta, Tahun 2001.

Kartasasmita, Koesnadi 'Administrasi Internasional', Lembaga penerbitan sekolah
tinggi ilmu administrasi Bandung, Tahun 1977.

Mukti, Takdir Ali, 'Paradiplomacy':. Kerjasama Luar Negeri Pemda di Indonesia The
Phinisi Press, Yogyakarta, 2013, PT. 2.

Pandji Santosa, *Administrasi Publik : Teori dan Aplikasi Good Governance*. Penerbit
PT Refika Aditama : Bandung. Tahun 2008.

Suryokusuno, Sumarno, '*Praktik Diplomasi*', STIH IBLAM, Jakarta, Tahun 2004.

Warsito, Tulus dan Kartikasari, Wahyuni, "Diplomasi Kebudayaan" Ombak,
Yogyakarta, Tahun 2007

Wolf, Stefan, "paradiplomacy, scope, opportunities and challenges" hal 1-2 dan 13, university of Nottingham, 2009.

ARSIP:

BKPM Provinsi DIY, 'Laporan Monitoring dan Evaluasi Kerja sama Luar Negeri', Tahun 2009.

Laporrn Moniitoring dan Evaluasi Kerjasama Luar Negeri, Biro Kerjasama, SETDA, Provinsi DIY, Tahun 2006.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DIY Tahun Anggaran 2002, Bahan Acara Nomor 36 Tahun 2003, Sekertariat DPRD Provinsi DIY.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DIY Tahun 2011, Sekertariat DPRD DIY, 2012.

Laporan Akhir Evaluasi kerja sama Dalam dan Luar Negeri Pemerintah DIY Tahun Anggaran 2013, Sub Bidang kerja sama, Badan kerja sama & Penanaman Modal (BKPM) Provinsi DIY.

Laporan Akhir Evaluasi kerja sama Dalam dan Luar Negeri Pemerintah DIY Tahun Anggaran 2013, Sub Bidang kerja sama, Badan kerja sama & Penanaman Modal (BKPM) Provinsi DIY

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban DIY Tahun 2015 pada program/kegiatan urusan kebudayaan

Laporan akhir survei alih fungsi lahan DKP DIY tahun 2016

Laporan Akhir Kerjasama dalam dan Luar Negeri Pemerintahan DIY tahun 2015

Nota Kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara DIY 2015

Statistik Kepariwisataaan DIY tahun 2016

WEBSITE ;

<http://www.sister-city.org/about>

<http://nhsistercities.org/page/what-are-sister-cities>

(www.city.kochi.kochi.jp).

<http://dppka.jogjaprov.go.id/document/infogyogyakarta.pdf> Tentang Informasi umum
Daerah Istimewa Yogyakarta

<http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/risalah/article/viewFile/921/846>

<http://budaya-indonesia.org/Daerah-Istimewa-Yogyakarta>

http://www.jasso.go.jp/en/about/statistics/intl_student/data2016.html

<https://youstudyjapan.com/id/plus/006>

Sejarah DIY, dalam <http://www.sejarahbangsaindonesia.co.cc>

Statistik Kepariwisata DIY tahun 2016 diakses dari

visitingjogja.web.id/.../Buku_Statistik_Kepariwisata_DIY_2015_05092016040516.pdf

Zulkifli, Kerjasama Internasional Sebagai Solusi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara (*Studi Kasus Indonesia*). Tesis diterbitkan. Jakarta: Universitas Indoneisa, Tahun 2009.

lib.ui.ac.id/file?file=digital/20305674...%20Kerjasama%20internasional.pdf.